

PELUANG DAN TANTANGAN MEMBANGUN MEDIA PENYIARAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI JAWA BARAT

Dr.Dede Fardiah,M.Si-FIKOM UNISBA (08122333753) :

dedehfardiah@gmail.com

ABSTRAK

Televisi lokal yang memiliki positioning sebagai media daerah, memuat content (berita, musik, hiburan, program kesenian, kebudayaan, hingga potensi ekonomi lokal) dan mengemas penyajian dengan mengedepankan kearifan lokal yang mencakup permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan. Walaupun mempunyai ciri khas dari segi pengemasan isu maupun bahasa, pada perkembangannya TV lokal masih belum mampu untuk menjadi alternatif tontonan bagi pemirsa. Padahal publik sesungguhnya menaruh harapan begitu tinggi terhadap televisi lokal. Kehadirannya di dunia penyiaran diharapkan dapat memberi alternatif tontonan dan dapat mengakomodasi khazanah lokalitas yang saat ini kurang tertampung dalam tayangan televisi

Keterbatasan investasi dan lemahnya daya saing terhadap TV nasional menjadi kendala tersendiri bagi TV lokal untuk bersaing dengan TV nasional, hal ini kemudian mengakibatkan TV lokal kesulitan di dalam mengembangkan dirinya. Popularitas TV lokal di tengah masyarakat yang kalah jauh dibanding TV nasional menjadi faktor bagi minimnya sponsor dan investasi pengiklan untuk ikut menghidupi TV lokal. Fenomena televisi lokal ini terjadi di setiap daerah di Indonesia termasuk Jawa Barat

Media penyiaran idealnya memainkan peran yang sangat penting dalam memelihara dan mengembangkan kearifan lokal, namun tantangan sistem media massa global diskursus relasi masyarakat, bisnis dan media tak bisa dielakan. Globalisasi juga memberikan dampak pada TV lokal di Indonesia yang mau tidak mau harus menampilkan produk impor agar lebih diminati oleh pemirsanya. Minimnya kreatifitas dari pelaku-pelaku TV lokal membuat program-program yang dihasilkan masih belum mencukupi untuk keseluruhan volume materi program yang harus diisi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, melakukan pengamatan selama 24 jam terhadap stasiun televisi lokal di Bandung. Dari pengamatan tersebut terungkap beberapa hal menarik, yaitu bahwa stasiun televisi lokal tampaknya belum mampu menggali dan

mengemas kearifan budaya lokal Jawa Barat untuk menjadi bahan siaran yang layak tonton.

Jika dicermati, maka secara umum di satu sisi peluang TV lokal memiliki pemirsa yang jelas dan berdampak pada target pasar yang jelas, selain itu tayangan program acara di stasiun lokal dapat menggambarkan keinginan masyarakat lokal dan mengangkat fenomena kehidupan masyarakat setempat karena memiliki unsur kedekatan dengan masyarakat lokal. Namun di sisi lain tantangan televisi lokal adalah kurangnya SDM yang berkualitas, jangkauan terbatas pada area lokal, memiliki keterbatasan finansial pada kegiatan operasional sehingga berpengaruh terhadap kualitas siarannya. Ketika jumlah stasiun televisi swasta semakin banyak maka tingkat kompetisi pun semakin tinggi sehingga setiap stasiun televisi termasuk televisi lokal dipaksa untuk bersaing. Maka televisi lokal di Jawa Barat perlu melakukan upaya dengan cara memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan agar televisi lokal tetap mampu bertahan sebagai simbolisasi cerminan kearifan lokal Jawa Barat.

Kata kunci : Media Penyiaran, TV Lokal, Kearifan Lokal

Pendahuluan

Penyiaran memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak. Karena itu, setiap lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa. Lembaga penyiaran juga mempunyai tugas sosial untuk menjaga integrasi nasional. Televisi lokal sebagai lembaga penyiaran di daerah, dituntut mampu menerjemahkan dan menyukseskan amanah otonomi daerah dengan mengembangkan konten-konten positif berbasis kearifan lokal daerah untuk pengembangan dan pembangunan daerah.

Televisi lokal memiliki *positioning* kuat sebagai media daerah. Mengapa dikatakan demikian? Karena televisi lokal di dalamnya memuat *content* (berita, musik, hiburan, program kesenian, kebudayaan, hingga potensi ekonomi lokal). TV lokal mengemas penyajian dengan mengedepankan kearifan lokal yang mencakup permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan.

Potensi stasiun televisi lokal beroperasi secara optimal cukup besar. Hal ini didukung amanat UU No 32/2002, Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Menurut PP No 50 Tahun 2005, penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran yang memiliki prinsip dasar keberagaman kepemilikan dan keberagaman program siaran dengan pola jaringan yang adil dan terpadu dalam pemberdayaan masyarakat daerah.

Dengan spirit otonomi daerah, dampak kehadiran TV Lokal merupakan warna baru dunia penyiaran tanah air karena selama ini kearifan lokal kurang optimal diangkat dalam wujud audio visual. Publik menaruh harapan sangat tinggi terhadap televisi lokal. Kehadirannya di dunia penyiaran diharapkan dapat memberi alternatif tontonan dan dapat mengakomodasi khazanah lokalitas yang saat ini kurang tertampung dalam tayangan televisi. Paket tayangan yang bermaterikan sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, dan unsur kedaerahan menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya optimalisasi pembangunan daerah. Sehingga kehadiran televisi lokal, menjadi solusi penting untuk hal tersebut.

Selain itu dalam perspektif Otonomi Daerah, kehadiran televisi lokal dapat mengurangi sentralisme informasi dan bisnis. Kehadiran televisi lokal dan televisi berjaringan, pemirsa tidak hanya dijejali informasi, budaya, dan gaya hidup global yang dihadirkan oleh televisi nasional. Pemirsa akan lebih banyak menyaksikan berbagai peristiwa dan dinamika di daerah dan lingkungannya. Oleh karena itu, televisi lokal merupakan kebutuhan masyarakat di daerah dalam proses menyeimbangkan informasi, termasuk untuk mengangkat kearifan lokal sebagai ciri yang kental dari masyarakat Indonesia.

Walaupun memiliki potensi yang cukup besar, pada prakteknya perkembangan televisi lokal memiliki banyak kendala. Keterbatasan investasi dan lemahnya daya saing terhadap TV nasional menjadi problem tersendiri bagi TV lokal untuk bersaing dengan TV nasional, hal ini kemudian mengakibatkan TV lokal

kesulitan di dalam mengembangkan dirinya. Popularitas TV lokal di tengah masyarakat yang kalah jauh dibanding TV nasional menjadi faktor bagi minimnya sponsor dan investasi pengiklan untuk ikut menghidupi TV lokal.

Masalah lain adalah pemerintah kurang tegas dalam merealisasikan UU Penyiaran no. 32 tahun 2002 (tentang Kedudukan TV lokal). Pelaksanaan pasal ini ditunda sampai tiga kali, Tahun 2005, 2007, baru pada Bulan Desember tahun 2009 peraturan ini diberlakukan. Bunyi UU serta penjelasan dan segala peraturannya, memberi peluang televisi lokal dapat terangkat dan potensi lokal yang sangat besar di daerah di seluruh nusantara, dapat terus bersiaran, dapat hidup dan menghidupi dirinya secara wajar. Namun pada pelaksanaannya perangkat undang-undang ini belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten.

Hal ini berdampak sistematis terhadap kelanjutan hidup TV lokal, maka banyak televisi lokal yang sudah beroperasi berjibaku dengan masalah internalnya yang mencakup persoalan buruknya manajemen, baik manajemen sumber daya manusia maupun manajemen keuangan, hingga pada persoalan sulitnya mendapatkan *share* iklan. Padahal, dukungan biaya operasional yang cukup dan stabil dari pemilik sangat menentukan kemampuan stasiun TV untuk memproduksi dan menyiarkan program bermutu, menarik, diminati dan dibutuhkan masyarakat.

Fenomena televisi lokal ini terjadi disetiap daerah di Indonesia termasuk Jawa Barat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, melakukan pengamatan selama 24 jam terhadap stasiun televisi lokal di Bandung. Dari pengamatan tersebut terungkap beberapa hal menarik, yaitu bahwa stasiun televisi lokal tampaknya belum mampu menggali dan mengemas kearifan budaya lokal Jawa Barat untuk menjadi bahan siaran yang layak tonton.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis akan melakukan kajian apa peluang dan tantangan dalam membangun media penyiaran khususnya televisi yang berbasis kearifan lokal di Jawa Barat ? Kajian dilakukan melalui studi literatur dengan cara mengkaji dan menganalisis fenomena di lapangan dalam amatan penulis. Untuk mempermudah analisis, terlebih dahulu tulisan ini akan membahas

konsep yang relevan dengan kajian ini yakni konsep tentang televisi dan televisi lokal dalam lintasan sejarah, ekonomi politik media penyiaran, perkembangan televisi lokal di Jawa Barat, kearifan lokal di Jawa Barat, peluang dan tantangan membangun TV lokal berbasis kearifan lokal di Jawa Barat. Secara detail akan diuraikan pada paparan berikut ini,

Televisi dan Televisi Lokal dalam Lintasan Sejarah

Televisi merupakan perkembangan media audiovisual yang ditemukan oleh *Paul Nipkow* dari Jerman pada tahun 1884. Di negara-negara Eropa, Amerika dan Negara maju lainnya, puluhan saluran TV tersedia dan dapat dipilih sekehendak hati. Mereka bersaing untuk menyajikan acara-acaranya yang terbaik agar dapat ditonton oleh masyarakat yang semuanya dilandasi perhitungan bisnis.

Di Indonesia kecenderungan televisi swasta sudah mulai mengarah kepada sistem Amerika, ini dimulai dari garapan-garapan sinetron, kuis dan beberapa acara hiburan lainnya. Cara seperti ini memang sangat menguntungkan bagi stasiun TV tersebut karena semuanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bisnis yaitu untung dan rugi. Tidak dapat dipungkiri bahwa televisi merupakan suatu bisnis maka tak heran kalau Bignell (2004 : 43) menyebutnya *Television today is a centralized business*.

Pergeseran politik tahun 1998 menimbulkan suasana dan kondisi baru di dunia pertelevisian. Selain terbukanya peluang untuk mendirikan televisi swasta juga munculnya gerakan di daerah untuk mendirikan stasiun televisi dan radio lokal. Reformasi 1998 menjadi titik tolak bagi berkembangnya industri penyiaran di daerah. Isu desentralisasi, otonomi daerah, frekuensi sebagai ranah publik, dan demokratisasi ranah penyiaran menimbulkan berkembangnya televisi lokal di daerah.

Data resmi Asosiasi Televisi Indonesia (ATVLI) menunjukkan hingga agustus 2003 jumlah televisi lokal di Indonesia mencapai 50 stasiun, tersebar dari Papua hingga Pematang Siantar. Jumlah tak sedikit mengingat rentang kelahirannya yang singkat, mulai tahun 1997. Secara garis besar, televisi-televisi lokal itu sesungguhnya

mengindikasikan 3 kategori televisi yang berbeda : televisi komunitas, televisi komersial lokal dan televisi publik daerah. (Sudibyo, 2004 : 101)

Eksistensi televisi lokal semakin mendapat tempat ketika ATVLI berdiri tahun 2003 di Bali. ATVLI merupakan wadah bagi televisi-televisi lokal yang sama-sama menginginkan legitimasi akan keberadaan mereka. Perjuangan televisi lokal mencapai klimaksnya ketika UU Penyiaran diundangkan pada 28 November 2002. Undang-undang ini memberi pengakuan hukum atas eksistensi lembaga penyiaran lokal, baik lembaga penyiaran swasta nasional, dengan mengharuskannya untuk berjejaring dengan televisi-televisi lokal.

Ekonomi Politik Media Penyiaran

Dalam proses perkembangan kebudayaan manusia, media massa adalah media yang mempunyai tingkat pengaruh yang cukup signifikan pada kehidupan sehari-hari. Proses relasional antara ideologi, media massa dan ekonomi politik media terangkum dalam kategori perspektif ekonomi politik dari Vincent Mosco (1996 : 104) yang pada intinya menyebutkan bahwa ekonomi politik komunikasi berupaya menjadikan media bukan sebagai pusat perhatian, dengan konsentrasi lebih diarahkan pada kajian mengenai keterkaitannya dengan ekonomi, politik dan faktor-faktor lainnya. Dengan demikian media bukan sebagai pusat perhatian namun dipandang sebagai sistem komunikasi yang terintegrasi dengan proses ekonomi, politik, sosial, dan budaya fundamental dalam masyarakat.

Pendekatan ekonomi politik merupakan sebuah kajian yang diidentifikasi sebagai kelompok pendekatan kritis (McQuail, 1996:82). Pendekatan ekonomi politik memfokuskan pada kajian utama tentang hubungan antara struktur ekonomi-politik, dinamika media, dan ideologi media itu sendiri. Perhatian penelitian ekonomi politik diarahkan pada kepemilikan, kontrol serta kekuatan operasional pasar media. Dari titik pandang ini, institusi media massa dianggap sebagai sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem politik. Karakter utama pendekatan ekonomi politik adalah produksi media yang ditentukan oleh: pertukaran nilai isi media yang berbagai macam di bawah kondisi tekanan ekspansi

pasar dan juga ditentukan kepentingan ekonomi-politik pemilik modal dan pembuat kebijakan media (Garnham dalam Mc Quail, 1996:82). Berbagai kepentingan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh keuntungan, sebagai akibat dari adanya kecenderungan monopolistis dan proses integrasi, baik secara vertikal maupun horisontal.

Dalam perspektif ekonomi politik kritis, perspektif ekonomi politik mengikuti Marx untuk memberikan perhatian pada pengorganisasian properti dan produksi pada industri budaya ataupun industri lainnya, bukannya pada proses pertukaran sebagaimana dilakukan liberalisme. Perspektif ini tidak mengabaikan pilihan-pilihan yang dibuat oleh produsen maupun konsumen industri budaya, akan tetapi apa yang dilakukan oleh produsen dan konsumen itu dilihat dalam struktur yang lebih luas lagi. Golding dan Murdock menempatkan perspektif ekonomi politik media pada paradigma kritis. Golding dan Murdock berpendapat bahwa perspektif ekonomi politik kritis berbeda dengan arus utama dalam ilmu ekonomi dalam hal holisme, keseimbangan antara usaha kapitalis dengan intervensi publik; dan keterkaitan dengan persoalan-persoalan moralitas seperti masalah keadilan, kesamaan, dan kebaikan publik (*public goods*). (dalam Curran dan Gurevitch, 1991:15 – 32)

Pendekatan ekonomi politik kritis memperhatikan perluasan “dominasi” perusahaan media, baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi budaya yang langsung dilindungi oleh pemilik modal. Tentu saja, ekstensifikasi dominasi media dikontrol melalui dominasi produksi isi media yang sejalan dengan preferensi pemilik modal. Proses komodifikasi media massa memperlihatkan dominasi peran kekuatan pasar. Proses komodifikasi justru menunjukkan menyempitnya ruang kebebasan bagi para konsumen media untuk memilih dan menyaring informasi.

Perspektif ekonomi politik kritis juga menganalisis secara penuh pada campur tangan publik sebagai proses legitimasi melalui ketidaksepakatan publik atas bentuk-bentuk yang harus diambil karena adanya usaha kaum kapitalis mempersempit ruang diskursus publik dan representasi. Dalam konteks ini dapat juga disebut adanya

distorsi dan ketidakseimbangan antara masyarakat, pasar dan sistem yang ada.

Sedangkan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh analisis ekonomi politik kritis terdiri dari tiga kriteria. Kriteria pertama adalah masyarakat kapitalis menjadi kelompok (kelas) yang mendominasi. Kedua, media dilihat sebagai bagian dari ideologis di mana di dalamnya kelas-kelas dalam masyarakat melakukan pertarungan, walaupun dalam konteks dominasi kelas-kelas tertentu. Kriteria terakhir, profesional media menikmati ilusi otonomi yang disosialisasikan ke dalam norma-norma budaya dominan.

Perkembangan Televisi Lokal di Jawa Barat

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat mencatat, sampai Maret 2010, di Bandung terdapat 23 lembaga penyiaran televisi. Dari 23 lembaga penyiaran (LP) itu 7 merupakan stasiun televisi lama yang dikategorikan *on air*, 10 LP merupakan TV berjaringan (berinduk kepada TV Nasional), sedangkan 6 LP lainnya masih dalam proses. Dilihat dari kuantitas, ternyata Jawa Barat memegang rekor terbanyak dibanding provinsi lain di Nusantara. KPID mencatat, di beberapa kota di Jawa Barat di luar Bandung, terdapat 49 LP. Kalau dijumlahkan dengan LP yang ada di Bandung, di seluruh Jawa Barat terdapat 72 LP atau stasiun televisi lokal.¹

Bahkan perkembangannya semakin bertambah stasiun televisi lokal yang ada di Jawa Barat diantaranya, TVRI Bandung, Bandung TV, DEPOK TV, CB Channel, CT Channel, *Ganeshatv*, IMTV, Jatiluhur TV, citra karawang TV, Megaswara TV, MQTV, Padjadjaran TV, Spacatoon Bandung, Bayu Salman TV, STV Bandung, TVB, Jabar TV, Garuda Vision, Nusantara Televisi, TAZ TV Tasikmalaya, SBCTV Indramayu, GALUH TV Ciamis, CIREBON TV, ESA TV JABAR, DIAN TV Indramayu dan lain-lain²

¹ *Observasi / Vol. 8, No.1/ Tahun 2010*

² <http://www.eocommunity.com>

Kearifan Lokal Jawa Barat

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara

terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.³

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai kedaerahan yang mengilhami dan menginspirasi tumbuhnya humanisme dan keunikan budaya yang hidup dalam lingkungan tertentu. Filosofi kearifan lokal adalah masalah pesan moral dan nilai optimisme. Kearifan lokal, tumbuh dan berkembang pada sebuah daerah atau kawasan tetapi kemudian meluas dan membesar hingga diakui kebenarannya sebagai kebenaran universal.

Jawa Barat disebut sebagai Tatar Pasundan atau Tatar Sunda dan masyarakatnya diidentifikasi melalui bahasanya, yaitu bahasa Sunda. Jawa Barat mewariskan berbagai peninggalan budaya serta kearifan lokal masyarakatnya sebagai wujud dari eksistensi sebuah peradaban. Jawa Barat memiliki potensi yang luar biasa dalam semua bidang kehidupan, tanah yang relatif subur, sarat dengan kekayaan sumber daya alam dan anekaragam budaya tersebar di 26 Kota/Kabupaten.

³ Sartini, *Menggali Kearifan Lokal. Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2*

Peluang Membangun TV Lokal Berbasis Kearifan Lokal di Jawa Barat

Kunci kesuksesan media televisi lokal adalah kemampuan mensinergikan Kebhinekaan Tunggal Ika dengan cara memperluas dan meningkatkan ideologi media lokal, baik sektor pendidikan, perekonomian dan pariwisata masing-masing daerah. Selain itu TV lokal harus mendorong pemberdayaan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat, menggali, mempertahankan dan melestarikan budaya serta tradisi masyarakat, sejalan dengan proses perkembangan zaman, dan taat pada kode etik jurnalistik, etika penyiaran serta tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Realisasi Undang-Undang Penyiaran yang mengatur sistem stasiun berjaringan memiliki manfaat untuk menciptakan sistem penyiaran yang berkeadilan dan berpihak pada publik. Dominasi isi siaran televisi selama ini dimonopoli oleh televisi swasta nasional sehingga isi siaran menghegemoni masyarakat.

Sistem berjaringan juga memberi peluang untuk mengakomodasi isi siaran lokal sehingga dapat menjadi kontrol terhadap isi siaran yang memiliki bias kultur, nilai, dan cara pandang global dan metropolitan. Peluang ini memberikan ruang bagi masyarakat daerah untuk mengekspresikan hasrat, kepentingan, kultur, nilai, dan cara pandang orang daerah di ruang publik yakni televisi lokal yang mendudukan kepentingan daerah dan kepentingan pusat pada posisi yang setara dan sejajar.

Peluang sistem berjaringan memungkinkan pemerataan ekonomi di bidang penyiaran akan terjadi karena *share* iklan terbagi secara proporsional tidak hanya dimonopoli televisi nasional tetapi terdistribusi ke televisi-televisi lokal yang ada di daerah. Hal ini akan memicu kesempatan bagi investor lokal di daerah untuk dapat berpartisipasi dalam bidang pertelevisian.

Faktor lain yang juga menjadi peluang adalah adanya kebijakan *diversity of content*. Kebijakan ini akan memberi peluang terciptanya tatanan baru penyiaran dengan *content* yang berpihak pada kepentingan masyarakat di daerah karena nilai-nilai, kultur, kearifan lokal, budaya, aspirasi dan beragam kepentingan mendapat

tempat yang wajar dan proporsional dalam tayangan-tayangan lembaga penyiaran yang bersiaran di daerah.

Pada pasal 1 ayat 15 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran yang dikeluarkan KPI tahun 2012 menyebutkan bahwa Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat. Pasal ini secara tidak langsung akan memberikan peluang kerja bagi anak-anak daerah yang ingin menggeluti dunia *broadcasting*, menumbuhkan industri-industri kreatif di daerah terutama terkait dengan ekspos budaya lokal, aktualisasi kearifan lokal, potensi sumberdaya alam, potensi pariwisata, informasi sosial pembangunan, serta hal lainnya yang berbau lokal. Pasal ini juga mengisyaratkan adanya kesempatan bagi daerah untuk ikut menikmati manfaat, bukan sekadar objek dari sebuah pasar bisnis.

Tantangan Membangun TV Lokal Berbasis Kearifan Lokal di Jawa Barat

Pada satu sisi kehadiran UU Penyiaran no. 32 tahun 2002 , yang kini tengah di review oleh DPR RI merupakan peluang yang membawa iklim kondusif bagi kelangsungan hidup stasiun TV lokal. Undang-Undang ini mensyaratkan stasiun televisi nasional mempunyai jaringan stasiun TV lokal untuk menyalurkan siaran mereka. Apabila hal ini dilaksanakan secara konsisten oleh pihak pemerintah TV lokal akan mendapatkan pembagian keuntungan dari setiap bentuk tayangan dan iklan yang ditampilkan. Namun, faktanya UU ini belum terealisasi secara optimal.

Faktor-faktor penyebab tidak optimalnya implementasi UU Penyiaran di atas karena secara yuridis dan teknis di lapangan mendapat kendala dalam melakukannya. Hal ini disebabkan karena adanya tumpang tindih antara kewenangan perizinan lembaga penyiaran antara KPI dengan Dekominfo. Tantangan terbesar lainnya adalah adanya arogansi dari pihak asosiasi TV nasional sehingga sulit mewujudkan kerjasama antara TV nasional dengan TV

lokal. Kondisi TV lokal yang belum memadai, dari segi teknis maupun sumber daya manusia menjadi faktor pemicu terhambatnya kerjasama antara kedua belah pihak.

Televisi lokal mendapat hambatan dari sisi finansial, padahal televisi merupakan bisnis yang tidak hanya memerlukan biaya investasi awal yang besar untuk pengadaan infrastruktur, peralatan produksi studio dan penyiaran (pemancar dan jaringan transmisi), melainkan juga memerlukan biaya operasional yang besar, terutama untuk biaya produksi dan pengadaan (pembelian) program. Akibat dari kurangnya SDM yang berkualitas dan keterbatasan finansial pada kegiatan operasional tentu akan berdampak pada kualitas siaran. Ketika jumlah stasiun televisi swasta semakin banyak maka tingkat kompetisi pun semakin tinggi sehingga setiap stasiun televisi termasuk televisi lokal dipaksa untuk bersaing.

Selain permasalahan ketidakajegan implementasi UU Penyiaran no 32 belum optimal muncul lagi tantangan baru yakni Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terkait migrasi penyiaran analog ke digital. TV Lokal harus menghadapi perubahan ke arah sistem penyiaran digital, mempersiapkan diri menjadi pengelola infrastruktur (LPPM) dan mempersiapkan diri sebagai Lembaga Penyelenggara Program Siaran (LPPS). Yang juga mencakup tentang perhitungan bisnis televisi lokal sebagai pengelola LPPM atau LPPS.

Beberapa rangkaian Permen yakni Permen Kominfo Nomor 22 Tahun 2011, Permen No.23 Tahun 2011, Permen No.5 Tahun 2012, dan terakhir terbitnya Kepmen Kominfo No. 95 Tahun 2012, yang memperbolehkan suatu pemilik modal untuk memiliki infrastruktur lebih dari satu zona. Dampak dari terbitnya Permen nomor 22 dan 23 tahun 2012 itu, memungkinkan terjadi terjadi pemusatan kepemilikan, tersingkirnya penyiaran lokal, dan lembaga penyiaran publik serta lembaga penyiaran komunitas, yang mengakibatkan tidak meratanya proses digitalisasi media sehingga mengakibatkan banyak warga negara di Indonesia daerah tertentu yang dikorbankan aksesibilitasnya.

Tantangan di Jawa Barat terkait televisi lokal yang berbasis kearifan lokal ini adalah belum terakomodasi dalam peraturan

daerah dan konsekuensinya belum memiliki akses terhadap alokasi anggaran daerah. Selama ini hanya TVRI Jawa Barat yang memperoleh alokasi anggaran itupun melalui program yang dibuat pemerintah provinsi, sementara bantuan langsung tidak dapat dilakukan karena aturan yang melarang pemberian bantuan pada instansi-instansi vertikal. TVRI Jawa Barat sebagai LPP (Lembaga Penyiaran Publik) dianggap sebagai instansi vertikal.

Kesimpulan

Kehadiran media penyiaran (TV lokal) yang menjunjung tinggi kearifan lokal sangat dibutuhkan untuk menggali dan memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat. Namun kehadiran media penyiaran (TV lokal) memiliki peluang dan tantangan tersendiri dalam konstelasi ekonomi politik di Indonesia.

Beberapa peluang yang diamanatkan dalam UU Penyiaran no 32 memungkinkan TV lokal bisa berkembang optimal dengan memaksimalkan *content* yang berbasis kearifan lokal akan memicu para kreator di daerah untuk membuat program yang berkualitas dan menarik. Pemerataan secara ekonomipun akan terwujud karena adanya share iklan hasil kolaborasi antara TV jaringan. Peluang TV lokal diperkuat pula oleh P3SPS yang mengangkat konten lokal ke permukaan.

Namun disisi lain secara kajian ekonomi politik media ketidaktegasan pemerintah mencerminkan adanya perluasan “dominasi” perusahaan media, baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi budaya yang langsung dilindungi oleh pemilik modal. Implementasi UU Penyiaran no 32 yang sedianya menjadi payung legitimasi untuk berkembangnya TV lokal seolah bias karena adanya usaha kaum kapitalis mempersempit ruang diskursus publik dan representasi. Dalam konteks ini ada semacam distorsi dan ketidakseimbangan antara masyarakat, pasar dan sistem yang ada.

Kondisi di atas tampak ketika pemberlakuan UU no 32 terus di undur beberapa kali, TV berjaring seolah enggan bekerja sama dengan TV lokal, TV lokal menghadapi kendala finansial dan sumber daya manusia, ditambah pula dengan produk-produk regulasi yang

tidak berpihak pada TV lokal seperti pemberlakuan migrasi digital ke analog dan kepemilikan media.

Di Jawa Barat kondisinya tidak jauh berbeda, karena regulasi merujuk pada pemerintah pusat sehingga secara tidak langsung berdampak pada perkembangan TV lokal dalam mengusung kepentingan publik yang berbasis kearifan lokal. Tidak ada perda yang secara eksplisit menyokong TV lokal, walaupun ada hanya TVRI, itupun terikat oleh aturan pusat.

Daftar Pustaka

- Bignell, Jonathan, 2004. *An Introduction to Television Studies*, New York and London, Routledge.
- Curran, James and Michael Gurevitch. 1991. *Mass Media and Society*. Edward Arnold: London
- Kuswandi, Wawan. 1996, *Komunikasi Massa; Sebuah Analisis Media Televisi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mosco, Vincent. 1996. *The Political Economy of Communication*. Sage Publication: New York
- Sudibyo, Agus. 2004. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, LKIS Yogyakarta.
- Quail, Dennis Mc. 1996. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar cetakan kedua*, Jakarta, Erlangga.

Sumber Lain :

- Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002
- Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Penyiaran (SPS) Tahun 2012
- <http://www.eocommunity.com>
- Sartini, *Menggali Kearifan Lokal. Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2*
- Observasi | Vol. 8, No.1 | Tahun 2010*

CURRICULUM VITAE

Dedeh Fardiah, lahir di Bandung 18 Februari 1968 adalah Dosen Tetap Program S1 dan S2 Pascasarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (UNISBA). Gelar sarjana (S1) dari Jurnalistik FIKOM UNISBA, Gelar Magister (S2) dan Doktor (S3) diperoleh di Program Pascasarjana FIKOM Universitas Padjadjaran Bandung (UNPAD).

Selain mengajar, pernah memegang jabatan sebagai Sekretaris Jurusan Jurnalistik (1994-1996) dan Ketua Bidang Kajian Jurnalistik (2000-2004) di FIKOM UNISBA. Kini dipercaya menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI (2009-skrng) dan menjadi Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, serta menjadi Penyunting Ahli Jurnal Terakreditasi "Observasi" yang diterbitkan oleh Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI)-Balitbang SDM Kementerian Komunikasi & informatika. Beberapa penelitian dan karya ilmiah yang dibuat banyak berkenaan dengan media massa. Pernah menulis buku "Hegemoni Pasar Tayangan Anak-Anak di Televisi" yang diterbitkan Unpad Press (2009)